



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat di lakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretaris Daerah sampai dengan Triwulan II.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan rencana kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 115 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

- Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
13. Keputusan Bupati Sragen Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Renja Sekretaris Daerah di susun untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Sragen dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretaris Daerah sampai Triwulan II.

Tujuan

Perubahan Renja Sekretaris Daerah di susun agar tujuan dan sasaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat tercapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIS DAERAH
TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan.

Rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Periode Pelaksanaan : 2025

Indikator dan Target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacau pada sasaran RKPD samapai akhir April 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian (%)	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH								
4.01	SEKRETARIS DAERAH								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persen	100%	38.336.409.769	25%	6.053.041.326	25%	25%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan tersedianya gaji dan tunjangan kepala daerah dan ASN di Sekretariat Daerah	Persen	100%	20.732.931.850	28%	6.053.041.326	28%	28%
4.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	149 orang/bulan	20.732.931.850	28%	6.053.041.326	28%	28%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan	persen	100	150.000.000	3%	4.100.000	3%	3%
4.01.01.20.5.10	Sosialisasi Peraturan perundang - undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang - undangan	orang	260	150.000.000	3%	4.100.000	3%	3%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) administrasi umum perangkat (persen)			6.017.909.000	27%	1.621.741.184	27%	27%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalansi	Jumlah bulan penyediaan komponen	Paket	12	49.975.000	24.6%	12.295.000	24.6%	24.6%

	listrik / penerangan kantor	instalasi listrik atau penerangan bangunan							
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan jumlah peralatan kantor yang tersedia	Paket	12	949.085.000	35.6%	337.950.000	35.6%	35.6%
4.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	Paket	12	50.750.000	98%	50.000.000	98%	98%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat dan kegiatan rutin di luar jam kerja	Paket	12	3.192.495.000	29.7%	949.820.000	29.7%	29.7%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Paket	12	235.024.000	63.5%	149.219.600	63.5%	63.5%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Dokumen	12	69.600.000	17.6%	12.290.000	17.6%	17.6%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	laporan	12	550.000.000	20%	110.166.584	20%	20%
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah daerah (Persen).			208.485.600	0%	0	0%	0%
4.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	unit	15	208.485.600	0%	0	0%	0%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang (CPJP) URUSAN pemerintah daerah (persen)			7.286.781.020	19%	1.399.754.469	19%	19%
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	Laporan	12	25.000.000	16.5%	4.137.500	16.5%	16.5%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Laporan	12	3.550.000.000	21.9%	777.894.788	21.9%	21.9%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pengalatan dan perlengkapan kantor.	Laporan	12	233.911.000	12.6%	29.500.000	12.6%	12.6%

4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.527.872.000	23.3%	588.222.181	23.3%	23.3%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah daerah (persen)			2.779.898.000	14.2%	394.798.372	14.2%	14.2%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	unit	55	1.259.230.000	27%	341.627.372	27%	27%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	unit	2	577.000.000	6.7%	38.819.000	6.7%	6.7%
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	unit	2	250.053.000	1.3%	3.350.000	1.3%	1.3%
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	unit	2	119.425.000	9.2%	11.002.000	9.2%	9.2%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya dana tunjangan opsasional kepala daerah dan wakil kepala daerah di tahun –n(persen).			2.363.685.400	18.2%	430.866.010	18.2%	18.2%
4.01.01.2.11.01	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah atau wakil kepala daerah	Orang	2	785.863.400	16.8%	132.299.548	16.8%	16.8%
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah.	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kepala daerah dan wakil kepala daerah.	paket	12	135.000.000	0%	0	0%	0%

4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang/bulan	100	1.442.822.000	20.7%	298.566.462	20.7%	20.7%
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun-n (persen)			217.950.000	0%	0	0%	0%
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	paket	200	217.950.000	10.6%	23.030.000	10.6%	10.6%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks kelembagaan(Nilai) Persentase PD dengan nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja nilai 10(persen) Persentase UPP dengan indeks kepuasan Masyarakat B	Nilai Persen Persen	80.05 40 100	400.000.000	11.7%	46.976.200	11.7%	11.7%
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan kelembagaan dan abalisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	dokumen	3	108.780.000	9.5%	10.305.000	9.5%	9.5%
4.01.01.2.13.02	Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	laporan	2	41.313.000	11.4%	4.714.500	11.4%	11.4%
4.01.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	dokumen	2	43.911.000	7.8%	3.429.000	7.8%	7.8%
4.01.01.2.13.03	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana (lapaoran)	dokumen	2	27.577.000	7.9%	2.200.000	7.9%	7.9%
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	dokumen	2	65.601.000	40%	26.327.700	40%	40%
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terpenuhinya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan.			20.000.000	0%	0	0%	0%

4.01.01.2.14.01	Fasilitas keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	laporan	12	20.000.000	0%	0	0%	0%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EKPPD	Nilai	33.37	17.497.803.450				
		Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	Persen	100					
		Persentase policy brief bidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan yang di manfaatkan	persen	100					
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang selesai disusun sesuai perundang-undang yang berlaku Persentase kerjasama yang terealisasi	Dokumen persen	6 100	425.000.000	45%	193.265.500	45%	45%
4.01.02.2.01.01	Penataan administrasi pemerintah	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan.	Dokumen	1	45.458.000	1.7%	783.000	1.7%	1.7%
4.01.01.2.01.02	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah peta rupa bumi Jumlah SPM Kabupaten	Dokumen	9	61.278.000	0%	0	0%	0%
4.01.01.2.01.03	Fasilitas pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	1	237.000.000	81.2%	192.482.500	81.2%	81.2%
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat		100	18.639.837.600	7.7%	1.431.241.063	7.7%	7.7%
4.01.01.2.02.01	Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual [Dokumen]	Dokumen	1	3.849.082.050	17.5%	674.092.063	17.5%	17.5%
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB [Dokumen]	Dokumen	1	5.581.558.500	0.3%	16.952.000	0.3%	0.3%
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	dokumen	1	7.474.382.650	9.9%	740.197.000	9.9%	9.9%

	masyarakat	Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas [Dokumen]							
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum			272.000.000	19.4%	52.698.000	19.4%	19.4%
4.01.02.2.03.01	Fasilitas penyusunan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan rakor jarkumda dan jumlah rancangan prokumda Jumlah nota dinas/review terhadap produk hukum daerah/kebijakan	Dokumen	3	73.597.500	62.7%	46.150.000	62.7%	62.7%
4.01.02.2.03.02	Fasilitas bantuan hukum	Jumlah kegiatan rakor ranham dan penanganan perkara	kasus	3	51.845.000	4.6%	2.410.000	4.6%	4.6%
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah buku/himpunan produk hukum	dokumen	3	104.022.000	3.9%	4.138.000	3.9%	3.9%
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Pesentase kerjasama yang terealisasi (Persen)			30.000.000	3.9%	1.185.000	3.9%	3.9%
4.01.02.2.04.01	Fasilitas kerjasama dalam negeri	Jumlah kegiatan kerjasama dalam negeri Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri	dokumen	1	19.579.750	3.9%	1.185.000	3.9%	3.9%
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase policy brief bidang perekonomian yang di manfaatkan Indeks tata kelola pengadaan Persentase policy brief bidang pembangunan yang di manfaatkan		100 7 90	2.052.027.196				
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase capaian kinerja kebijakan perekonomian % BUMD sehat	persen	100%	1.150.000.000	2.2%	25.360.000	2.2%	2.2%
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen	12	50.500.000	27.1%	13.715.000	27.1%	27.1%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian.	laporan	12	14.320.000	7.2%	1.033.500	7.2%	7.2%

4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan pengawasan ekonomi mikro kecil	dokumen	12	1.032.690.000	1%	10.611.500	1%	1%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		persen	100	199.999.446	15.7%	23.565.000	15.7%	15.7%
4.01.03.2.02.01	Fasilitas penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	dokumen	1	43.168.146	54.5%	23.565.000	54.5%	54.5%
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	80.564.200	0%	0	0%	0%
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Laporan	12	25.000.500	0%	0	0%	0%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	indeks	7	442.774.100	0%	0	0%	0%
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	1	141.658.250	0%	0	0%	0%
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	dokumen	1	69.110.500	0%	0	0%	0%
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah peserta pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa	orang	190	45.015.600	0%	0	0%	0%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				550.000.000	20%	113.836.000	20%	20%
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman modal, Tenaga kerja.	dokumen	12	550.000.000	20%	113.836.000	20%	20%

Dari tabel diatas dapat di beri penjelasan sebagai berikut pada tahun 2025 Sekretaris Daerah melaksanakan 3 program, 18 kegiatan dan 48 sub kegiatan, dengan anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp.57.886.240.415,00. Capaian untuk masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan sampai akhir triwulan I adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dari anggaran Rp. 21.449.686.769,00 telah terrealisasi Rp. 6.053.041.326,00 (28%) untuk pembayaran gaji dan TPP PNS Sekretaris Daerah selama 3 bulan di gaji dan TPP ditambah gaji 14 ANS di Sekretaris Daerah.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Dari anggaran Rp. 135.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 40.065.000,00 (30 %) untuk pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dari anggaran Rp. 150.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 4.100.000,00 (3%) untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan di bagian hukum.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dari anggaran Rp. 49.975.000,00 telah terrealisasi Rp. 12.295.000,00 (25%) untuk pengadaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari anggaran Rp. 1.085.425.000,00 telah terrealisasi Rp. 337.950.000,00 (31%) kegiatan akan di dilaksanakan pada triwulan I.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dari anggaran Rp. 150.750.000,00 telah terrealisasi Rp. 50.000.000,00 (33%) untuk pembelian peralatan rumah tangga.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Dari anggaran Rp. 3.699.995.000,00 telah terrealisasi Rp. 949.820.000,00 (26%) untuk pengadaan logistik kantor.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dari anggaran Rp. 262.344.000,00 telah terrealisasi Rp. 149.219.600,00 (57%) untuk pembelian barang cetak dan penggandaan.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dari anggaran Rp. 69.600.000,00 telah terrealisasi Rp. 12.290.000,00 (18%) untuk pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dari anggaran Rp. 700.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 110.166.584,00 (16%) untuk pengadaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dari anggaran Rp. 208.485.600,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk pembelian kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dari anggaran Rp. 100.180.000,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya akan dilaksanakan pada triwulan III.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dari anggaran Rp. 25.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 4.137.500,00 (17%) untuk pembelian alat tulis kantor.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dari anggaran Rp. 4.000.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 777.894.788,00 (19%) untuk pembayaran jasa komunikasi, dan sumber daya air dan listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dari anggaran Rp. 233.911.000,00 telah terrealisasi Rp. 29.500.000,00 (13%) untuk pembelian peralatan dan kelengkapan kantor.
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dari anggaran Rp. 3.027.870.020,00 telah terrealisasi Rp. 588.222.181,00 (19%) untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dari anggaran Rp. 1.588.420.000,00 telah terrealisasi Rp. 341.627.372,00 (22%) untuk pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari anggaran Rp. 722.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 38.819.000,00 (5%) untuk biaya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari anggaran Rp. 350.053.000,00 telah terrealisasi Rp. 3.350.000,00 (1%) untuk biaya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dari anggaran Rp. 119.425.000,00 telah terrealisasi Rp. 11.002.000,00 (9%) untuk biaya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari anggaran Rp. 785.863.400,00 telah terrealisasi Rp. 132.299.548,00 (17%) untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari anggaran Rp. 1.442.822.000,00 telah terrealisasi Rp. 298.566.462,00 (21%) untuk pembayaran dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.

8. Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
 Dari anggaran Rp. 217.950.000,00 telah terrealisasi Rp. 23.030.000,00 (11%) untuk pengadaan kerumah tanggaan Sekretariat Daerah.
9. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 Dari anggaran Rp. 130.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 10.305.000,00 (8%) untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan.
 - b. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 Dari anggaran Rp. 65.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 4.714.500,00 (7%) untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan pelayanan public dan tata laksana.
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 Dari anggaran Rp. 75.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 3.429.000,00 (5%) untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
 Dari anggaran Rp. 45.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 2.200.000,00 (5%) untuk memenuhi kebutuhan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 Dari anggaran Rp. 85.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 26.327.770,00 (31%) untuk memenuhi kebutuhan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitas Keprotokolan
 Dari anggaran Rp. 40.082.000,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk memenuhi kebutuhan keprotokolan.
- B. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 1. Administrasi Tata Pemerintahan
 - a. Penataan Administrasi Pemerintahan
 Dari anggaran Rp. 60.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 783.000,00 (1%) untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan.
 - b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Dari anggaran Rp. 120.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan.

c. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dari anggaran Rp. 245.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 192.482.500,00 untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Dari anggaran Rp. 5.470.520.800,00 telah terrealisasi Rp. 674.092.063,00 (12%) untuk kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual.

b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Dari anggaran Rp. 5.592.971.000,00 telah terrealisasi Rp. 16.952.000,00 (10,29%) untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial.

c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Dari anggaran Rp. 7.576.345.800,00 telah terrealisasi Rp. 740.197.000,00 (10%) untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial.

3. Fasilitas dan Koordinasi Hukum

a. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah

Dari anggaran Rp. 82.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 46.150.000,00 (56%) untuk pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

b. Fasilitas Bantuan Hukum

c. Dari anggaran Rp. 65.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 2.410.000,00 (4%) untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitas bantuan hukum

d. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Dari anggaran Rp. 125.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 4.138.000,00 (3%) untuk pelaksanaan kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

4. Fasilitas Kerja Sama Daerah

a. Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

Dari anggaran Rp. 30.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 1.185.000,00 (4 %) untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri.

C. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Dari anggaran Rp. 75.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 13.715.000,00 (18%) untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Dari anggaran Rp. 25.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 1.033.500,00 (4%) untuk pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.

c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Dari anggaran Rp. 1.050.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 10.611.500,00 (1%) untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

a. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan

Dari anggaran Rp. 59.999.746,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembangunan.

b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Dari anggaran Rp. 89.999.200,00 telah terrealisasi Rp. 23.565.000,00 (26%) untuk pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Dari anggaran Rp. 50.000.500,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dari anggaran Rp. 250.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dari anggaran Rp. 101.578.500,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dari anggaran Rp 91.195.600,00 telah terrealisasi Rp. 0,00 (0%) untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Dari anggaran Rp. 550.000.000,00 telah terrealisasi Rp. 113.836.000,00 (21,00%) untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Untuk sub kegiatan yang menghasilkan dokumen, hasil akhir tersusun pada akhir tahun anggaran. Beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi Sekretaris Daerah, pelaksanaan dan anggrannya di sesuaikan dengan kebutuhan dalam satu tahun berjalan, yaitu tahun 2025. Beberapa kegiatan memang tidak setiap tahun di laksanakan, disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan, dan adanya kewajiban untuk mendukung program – program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sampai pada akhir triwulan I realisasi anggaran sudah mencapai Rp 11.854.740.194,00 atau 19%, ada beberapa kegiatan yang realisasinya masih rendah di bawah 25% karena kegiatan tersebut di rencanakan di laksanakan pada triwulan II, III atau IV.

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Sekretaris Daerah

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di kenal adanya program, kegiatan dan sub kegiatan, terakhir daiadakan perubahan atas Permendagri ini dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889, tanggal 27 Desember 2021 tentang hasil verifikasi validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi , kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, sementara sub kegaiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah di tetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah di erncanakan. Indikator kinerja di pergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah di buat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana program dan kegiatan prioritas Sekreatris Daerah tahun 2025, berisi program dan kegaiatan, utnuk mencapai sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegaiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan

pendanaan (pagu indikatif), selanjutnya di jadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

Dalam DPA 2025 Sekretaris Daerah mempunyai 3 program, 18 Kegiatan dan 48 sub kegiatan, untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal maka di laksanakan perubahan rencana kerja. Dalam perubahan 2025, disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan asasaran yang telah di tetapkan.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Bertambah/Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
			Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Pergeseran Terakhir APBD 2025 (Rp)	Perubahan APBD 2025 (Rp)	Target	Satuan	Anggaran(Rp)	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH										
4.01	SEKRETARIS DAERAH				62.624.088.935	0	3.857.733.296			57.886.240.415	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah		Persen	35.759.913.422	0	1.794.468.796		Persen	37.554.382.218	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Persen	19.864.058.541	0	0	14	Persen	19.864.058.541	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	19.864.058.541	0	492.269.684	14	bulan	20.356.328.225	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan	100	persen	75.000.000	0	0	100	persen	75.000.000	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	300	orang	75.000.000	0	0			75.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) administrasi umum perangkat (persen)			4.245.602.000	0	789.988.000			4.245.602.000	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan	12	Paket	15.002.000	0	10.000.000	12	Paket	25.002.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan jumlah	12	Paket	200.000.000	00	104.988.000	12	Paket	304.988.000	

		peralatan kantor yang tersedia									
4.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	12	Paket	111.000.000	0	0	12	Paket	111.000.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat dan kegiatan rutin di luar jam kerja	12	Paket	3.100.000.000	0	575.000.000	12	Paket	3.675.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	Paket	250.000.000	0	0	12	Paket	250.000.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	12	Dokumen	69.600.000	0	0	12	Dokumen	69.600.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	12	laporan	500.000.000	0	100.000.000	12	laporan	600.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah daerah (Persen).			2.600.180.000	0	-617.778.000			1.982.402.000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3	unit	2.500.000.000	0	-670.000.000	3	unit	1.830.000.000	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	20	unit	100.180.000	0	52.222.000	20	unit	152.402.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang (CPJP) URUSAN pemerintah daerah (persen)			4.392.872.000	0	425.000.000			4.817.872.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	12	Laporan	25.000.000	0	0	12	Laporan	25.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah laporan penyediaan jasa	12	Laporan	1.700.000.000	0	400.000.000	12	Laporan	2.100.000.000	

	air dan listrik	komunikasi,sumber daya air dan listrik									
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pengalatan dan perlengkapan kantor.	12	Laporan	220.000.000	0	0	12	Laporan	220.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyedian jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	2.447.872.000	0	25.000.000	12	Laporan	2.472.872.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah daerah (persen)			1.840.000.000	0	26.789.112			1.866.789.112	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	50	unit	1.440.000.000	0	-60.000.000	50	unit	1.380.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	5	unit	250.000.000	0	40.000.000	5	unit	290.000.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	5	unit	50.000.000	0	16.839.112	5	unit	66.839.112	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / rehabilitasi sara dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	5	unit	100.000.000	0	29.950.000	5	unit	129.950.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya dana tunjangan opsasional kepala daerah dan wakil kepala daerah di tahun – n(persen).			2.188.888.881	0	528.200.000			2.717.088.881	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah atau wakil kepala daerah	2	Orang	778.888.881	0	2.200.000	2	Orang	781.088.881	

4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			90.000.000,00	0	0			90.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	5	Orang	1.320.000.000	0	526.000.000	5	Orang	1.846.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun-n (persen)			198.230.000	0	0			198.230.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	150	paket	198.230.000	0	0	150	paket	198.230.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks kelembagaan(Nilai) Persentase PD dengan nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja nilai 10(persen) Persentase UPP dengan indeks kepuasan Masyarakat B	80.05 40 100	Nilai Persen Persen	320.000.000	0	150.000.000	80.05 40 100	Nilai Persen Persen	470.000.000	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan kelembagaan dan abalisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	3	dokumen	115.000.000	0	95.000.000	3	dokumen	210.000.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	2	laporan	45.000.000	0	15.000.000	2	laporan	60.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2	dokumen	60.000.000	0	20.000.000	2	dokumen	80.000.000	
4.01.01.2.13.03	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan	2	dokumen	45.000.000	0	10.000.000	2	dokumen	55.000.000	

	laksana	tata laksana (lapaoran)									
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	2	dokumen	55.000.000	0	10.000.000	2	dokumen	65.000.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terpenuhinya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan.			35.082.000	0	0			35.082.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitas keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	12	laporan	35.082.000	0	0	12	laporan	35.082.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EKPPD Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi Persentase policy brief bidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan yang di manfaatkan	33.37 100 100	Nilai Persen persen	16.105.675.600	0	-16.230.675.600	33.37 100 100	Nilai Persen persen	18.058.940.100	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang selesai disusun sesuai perundang-undang yang berlaku Persentase kerjasama yang terealisasi	6 100	Dokumen persen	413.000.000	0	100.000.000	6 100	Dokumen persen	513.000.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan administrasi pemerintah	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan.	2	Dokumen	50.000.000	0	100.000.000	2	Dokumen	150.000.000	
4.01.01.2.01.02	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah peta rupa bumi Jumlah SPM Kabupaten	1	Dokumen	120.000.000	0	0	1	Dokumen	120.000.000	
4.01.01.2.01.03	Fasilitas pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan otonomi daerah	3	Dokumen	243.000.000	0	0	3	Dokumen	243.000.000	

4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat	100		15.647.075.600	0	1.678.264.500	100		17.325.340.100	
4.01.01.2.02.01	Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual [Dokumen]	1	Dokumen	4.666.771.800	0	1.168.269.000	1	Dokumen	5.835.040.800	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB [Dokumen]	1	Dokumen	5.912.000.000	0	145.000.000	1	Dokumen	6.057.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas [Dokumen]	1	dokumen	4.843.303.800	0	629.995.500	1	dokumen	5.473.299.300	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum	5		193.600.000	0	0	5		193.600.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitas penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5	Dokumen	70.500.000	0	0	4	Dokumen	70.500.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitas bantuan hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	kasus	37.100.000	0	0	2	kasus	37.100.000	

4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentas	2	dokumen	86.000.000	0	20.000.000	100	dokumen	106.000.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Pesentase kerjasama yang terealisasi (Persen)	100	persen	27.000.000	0	0			27.000.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitas kerjasama dalam negeri	Jumlah kegiatan kerjasama dalam negeri Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri	2	dokumen	27.000.000	0	0	2	dokumen	27.000.000	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase policy brief bidang perekonomian yang di manfaatkan Indeks tata kelola pengadaan Persentase policy brief bidang pembangunan yang di manfaatkan	100 7 90		2.318.856.650	0	-1.487.196.650	100 7 90		2.035.136.599	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase capaian kinerja kebijakan perekonomian % BUMD sehat			1.150.000.000	0	0			1.150.000.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	12	dokumen	75.000.000	0	0	12	dokumen	75.000.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomiaan.	12	laporan	25.000.000	0	0	12	laporan	25.000.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan pengawasan ekonomi mikro kecil	12	dokumen	1.050.000.000	0	0	12	dokumen	1.050.000.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		90		149.993.200	0	0	90		149.993.200	

4.01.03.2.02.01	Fasilitas penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	dokumen	49.994.000	0	0	2	dokumen	49.994.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	74.999.400	0	0	1	Laporan	74.999.400	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	4	Laporan	24.999.800	0	0	4	Laporan	24.999.800	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	7	indeks	418.863.450	0		7	indeks		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200	dokumen	279.550.350	0		200	dokumen		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	200	dokumen	65.597.500	0		200	dokumen	65.597.500	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah peserta pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa	270	orang	73.715.600	0		270	orang		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				306.583.900	0					
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sikronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman modal, Tenaga kerja.	12	dokumen	306.583.900	0		12	dokumen		

Dari tabel diatas dapat di ketahui, pada perubahan 2024 ada 3 program , 18 kegiatan dan 49 sub kegiatan ada yang mengalami perubahan dari anggaran penetapan sebesar Rp. 53.850.725.621,00 mengalami perubahan menjadi Rp. 57.708.458.917,00 bertambah sebesar Rp. 3.857.733.296,00. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dari semula anggaran Rp. 19.864.058.541,00 dalam perubahan ada penambahan anggaran sebesar Rp 492.269.684,00 sehingga anggaran menjadi Rp. 20.356.328.225,00 untuk pembayaran gaji dan TPP PNS Sekretaris Daerah selama 12 bulan di tambah gaji dan TPP gaji 13 serta 14 PNS di Sekretaris Daerah.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 15.002.000,00 bertambah Rp. 10.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 25.002.000,00.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 200.000.000,00 bertambah Rp. 104.988.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 304.988.000,00.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 bertambah Rp. 575.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 3.675.000.000,00.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 500.000.000,00 bertambah Rp. 100.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 600.000.000,00.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 berkurang Rp. 670.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 1.823.915.000,00.

- b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya.
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 100.180.000,00 bertambah Rp. 52.222.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 152.402.000,00.
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 1.700.000.000,00 bertambah Rp. 400.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 2.100.000.000,00.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 2.447.872.000,00 bertambah Rp. 25.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 2.472.872.000,00.
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 1.440.000.000,00 berkurang Rp. 60.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 1.380.000.000,00.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 250.000.000,00 bertambah Rp. 40.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 290.000.000,00.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 50.000.000,00 bertambah Rp. 16.839.112,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 66.839.112.000,00.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 100.000.000,00 bertambah Rp. 29.950.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 129.950.000,00.
- 6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 778.888.881,00 bertambah Rp. 2.200.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 781.000.000,00.
 - b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 1.320.000.000,00 bertambah Rp. 526.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 1.846.000.000,00.
7. Penataan Organisasi
- a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 115.000.000,00 bertambah Rp. 95.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 210.000.000,00.
 - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 45.000.000,00 bertambah Rp. 15.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 60.000.000,00.
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 60.000.000,00 bertambah Rp. 20.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 80.000.000,00.
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 45.000.000,00 bertambah Rp. 10.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 55.000.000,00.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 55.000.000,00 bertambah Rp. 10.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 65.000.000,00.
- B. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Administrasi Tata Pemerintahan
 - a. Penataan Administrasi Pemerintahan
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 50.000.000,00 bertambah Rp. 100.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 150.000.000,00.
 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 4.666.771.800,00 bertambah Rp. 1.168.269.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 5.835.040.800,00.
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 5.912.000.000,00 bertambah Rp. 145.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 6.057.000.000,00.
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 4.843.303.800,00 bertambah Rp. 629.995.500,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 5.473.299.300,00.
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- a. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Dari semula anggaran penetapan sebesar Rp. 86.000.000,00 bertambah Rp. 20.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 106.000.000,00.

BAB V.

P E N U T U P

Rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Sekretariat Daerah 2021-2026. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2024 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Sekretariat Daerah pada tahun 2024, yang mencakup 3 program, 18 kegiatan untuk mencapai 4 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan disusunnya rencana kerja setiap tahun dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, target Pembangunan di Kabupaten Sragen.

Selain itu untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah guna bersama sama melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah- langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan.

Sragen, 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH



dr. HARGIYANTO, M. Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680309 199803 1 010